



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PBB-P2 PEMECAHAN**

2024

**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

Jl. Sawahan no. 50 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN

Jl. Sawahan No. 50 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Email: bapenda@padang.go.id

Nomor SOP	000-16-1/05.17.b/Bapenda-PD/2024
Tgl. Pembuatan	02 Apr 2018
Tgl. Revisi	18 Sep 2024
Tgl. Efektif	18 Sep 2024
Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Drs. Yosefrawan NIP. 6509391986021002
Judul SOP	PELAYANAN PBB-P2 PEMECAHAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 20232 tentang Aparatur Sipil Negara ; 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; 4. Undang-Undang No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsasi Birikrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Susunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. 7. Peraturan Derah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pendapatan Daerah 9. Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata cara, Pemungutan Pajak, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan Pembebasan, Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak dan/ atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah. 10. ISO 9001:2015 Klausul 7.5.1 Pengendalian Dokumen	1. Mengerti peraturan terkait dengan PBB 2. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan PBB 3. Mampu menganalisa dan membandingkan NJOP dengan nilai PBB
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Pengendalian Rekaman (Arsip) 2. SOP Pengendalian Dokumen	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer dan Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika prosedur ini tidak dilakukan maka dapat berakibat tidak terlaksananya pembayaran PBB dan potensi penerimaan PBB tidak maksimal	1. Berita Acara Verifikasi/ Validasi (Data Baru) 2. Berita Acara Survei Lapangan 3. Laporan Tunggakan Pembayaran PBB-P2 4. SPPT PBB-P2 5. Tanda Terima

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Kepala BAPENDA Kota Padang

PELAYANAN PBB-P2 PEMECAHAN

URUTAN PROSEDUR / KEGIATAN		Pelaksana						Mutu Baku				
No	Urutan Prosedur / Kegiatan	Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Subid. PIP	Subid. Pendaftaran dan Pendaftaran	Petugas Survei	Subid. Penetapan	Kebid. Pendaftaran dan Penetapan	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket
1	Menyerahkan berkas persyaratan permohonan pelayanan PBB-P2 kepada petugas Pelayanan								Berkas Persyaratan Pelayanan PBB-P2	5	Berkas Persyaratan Pelayanan PBB-P2	
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan permohonan PBB-P2 Jika lengkap diberikan Tanda Terima Berkas kepada Wajib Pajak Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada Wajib Pajak								Berkas Persyaratan Pelayanan PBB-P2	10	Tanda Terima	
3	Menyerahkan berkas persyaratan permohonan pelayanan PBB-P2 ke Subid PIP dilengkapi dengan Berita Acara Verifikasi/ Validasi (Pemecahan)								Berkas Persyaratan Pelayanan PBB-P2	5	Berita Acara Verifikasi/ Validasi (Pemecahan)	
4	Melakukan verifikasi ulang dan pengesahan Berita Acara Verifikasi/ Validasi (Pemecahan)								Berita Acara Verifikasi/ Validasi (Pemecahan)	5	Disahkan	
5	Melakukan verifikasi berkas persyaratan permohonan pelayanan PBB-P2 Jika sudah sesuai, Melakukan survei lapangan Jika tidak sesuai, maka akan diterbitkan Berita Acara oleh Subid Pendaftaran dan Pendaftaran								Berita Acara Verifikasi/ Validasi (Pemecahan)	15	Berita Acara Survei Lapangan	
6	Melakukan Survei Lapangan dan Menerbitkan Berita Acara Lapangan								Surat Tugas Survei Lapangan Berkas Kelengkapan Permohonan PBB-P2	120	Berita Acara Survei Lapangan	
7	Meminta Wajib Pajak menandatangani Berita Acara Lapangan								Berita Acara Survei Lapangan	120	Berita Acara Survei Lapangan	

DAFTAR RIWAYAT REVISI

No.	Tanggal Revisi	Perubahan
1.	02-Apr-18	Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
2.	18-Sep-24	Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015